

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat tanah Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb dalam perspektif keadilan hukum. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan hakim pad atindak pidana pemalsuan surat tanah dalam Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat tanah Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb dalam perspektif keadilan hukum? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundnag-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginverarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Disparitas Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah diketahui disebabkan oleh beberapa faktor hukum yang berasal dari hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa pemalsuan surat tanah yakni dalam Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb, keyakinan majelis hakim menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 263 KUHP dan dinyatakan bebas. Sementara itu dalam Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb, majelis hakim memiliki keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP, dan dijatuhi putusan pidana penjara 3 tahun. Pertimbangan hakim jika dilihat dari sisi perspektif keadilan hukum, hakim haruslah memiliki kebijaksanaan dalam melihat fakta hukum di persidangan dan memiliki keadilan hukum yang mana tidak harus sama rata namun berimbang dan berlandaskan hukum, seharusnya dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana kedua terdakwa haruslah mencerminkan keadilan hukum. Rekomendasi diberikan: 1) Kepada pemangku kepentingan adanya pedoman penjatuhan pidana secara detail terhadap suatu perkara-perkara yang memiliki karakteristik sejenis agar terciptanya keserasian dalam pengambilan keputusan oleh hakim, serta meminimalisir adanya disparitas putusan karena perbedaan penjatuhan hukuman atau pidana antara hakim yang satu dengan hakim lainnya. 2) Agar hakim lebih menekankan adanya peradilan yang dapat mewujudkan unsur keadilan hukum bagi setiap pihak yang bersangkutan dengan perkara pidana di dalam persidangan.

Kata Kunci: ***Disparitas, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Keadilan Hukum.***

***DISPARITIES IN CRIMINAL ACTS OF LAND CERTIFICATE FORGERY FROM THE
PERSPECTIVE OF LEGAL JUSTICE***

ABSTRACT

The purpose of the research is to understand and analyze the judges' considerations in delivering verdicts against the perpetrators of land deed forgery in Decision Number 622/Pid.B/2023/PN Jmb and Decision Number 74/Pid.B/2024/PN Jmb from the perspective of legal justice. With that objective, the issue discussed is: 1)What form of penalty was imposed by the judge in the case of land deed falsification, as stipulated in Decision Number 622/Pid.B/2023/PN Jmb and Decision Number 74/Pid.B/2024/PN Jmb? 2)How the judge's considerations in rendering a verdict against the perpetrators of land deed forgery in Decision Number 622/Pid.B/2023/PN Jmb and Decision Number 74/Pid.B/2024/PN Jmb from the perspective of legal justice? With the formulation of the problem, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials was conducted by inventorying, systematizing, and interpreting. The research results show that: 1) The disparity in Criminal Verdict Number 622/Pid.B/2023/PN Jmb and Criminal Verdict Number 74/Pid.B/2024/PN Jmb in the crime of land deed forgery is known to be caused by several legal factors originating from the law contained in legislation, internal factors of the judge originating from within the judge, and external factors of the judge originating from the condition of the defendant in the trial. 2) The judge's considerations in imposing a sentence on the defendant for land deed forgery in Criminal Decision Number 622/Pid.B/2023/PN Jmb were based on evidence and legal facts presented during the trial. The panel of judges believed that the actions of the defendant did not meet the elements of Article 263 of the Criminal Code and declared the defendant not guilty. Meanwhile, in Criminal Decision Number 74/Pid.B/2024/PN Jmb, the panel of judges had a basis for consideration in deciding the case by looking at the evidence and legal facts presented in the trial. Recommendations are given: 1) To the stakeholders, there should be detailed guidelines for sentencing in cases with similar characteristics to create consistency in decision-making by judges and minimize disparities in verdicts due to differences in sentencing between one judge and another. 2) So that judges place more emphasis on a judicial process that can realize the element of legal justice for every party involved in criminal cases during the trial.

Keywords: *Disparity, Criminal Offense of Forgery, Legal Justice.*